

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ebola merupakan jenis virus yang pertama kali ditemukan pada tahun 1976 di wilayah Sudan, Afrika Timur. Virus Ebola termasuk ke dalam keluarga *Floviridae* dan genus *Ebolavirus*. Virus Ebola juga memiliki lima jenis spesies dan empat di antaranya dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Empat spesies virus Ebola yang berbahaya bagi manusia antara lain adalah: *Tai Forest Ebolavirus*, *Zaire Ebolavirus*, *Sudan Ebolavirus*, dan *Bundibugyo Ebolavirus*. Menurut para ahli, virus Ebola memiliki tingkat transmisi penyebaran yang sangat cepat karena dapat ditularkan melalui kontak melalui tetesan darah, cairan urin, dan *droplet* air liur (Hendrawati, 2014). Terjadinya peristiwa wabah virus Ebola di wilayah Afrika Barat pada tahun 2014 kemudian langsung menjadi perhatian internasional saat itu.

Peristiwa wabah virus Ebola pertama kali diumumkan pada tanggal 25 Maret tahun 2014 oleh CDC (*Central Disease Control*). Terjadinya wabah virus Ebola pada bulan Maret disebabkan oleh varian Zaire Ebolavirus yang menyebar dengan cepat ke beberapa wilayah di Afrika. Pada bulan Maret, WHO (*World Health Organization*) juga menyatakan bahwa terdapat penyebaran virus Ebola di wilayah perkotaan Conakry di Guinea, Afrika. Dengan terjadinya penyebaran virus Ebola di salah satu perkotaan besar di wilayah Guinea, WHO pun mengirim tim peneliti untuk menyelidiki dan menangani peristiwa yang terjadi. Namun karena tim peneliti yang didatangkan oleh WHO belum memiliki pengalaman untuk menangani virus Ebola, maka tim yang dikirim oleh WHO tidak dapat meneliti peristiwa ini secara efektif (Wenham, 2017). Dua bulan setelahnya MSF (*Medecins San Frontieres*) mempublikasikan laporan bahwa penyebaran virus Ebola perlu mendapatkan perhatian lebih jauh karena telah

terjadi krisis kesehatan yang cukup parah. Satu bulan setelahnya, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2014, WHO baru merespon laporan dari MSF dengan pendeklarasian PHEIC (*Public Health of International Concern*) dan meminta koordinasi internasional untuk menahan laju penyebaran virus secara efektif. MSF pun mengkritik WHO pada tanggal 15 Agustus tahun 2014 karena menganggap WHO telah menyepelekan masalah kesehatan serius (Ippolito et al., 2015).

Pada tanggal 18 September tahun 2014, PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) akhirnya ikut turun tangan dan mengeluarkan draft resolusi 2177 yang berisi bahwa koordinasi internasional yang baik sangat dibutuhkan agar stabilitas dan keamanan dunia tetap terjaga sebagaimana mestinya. Menurut data dari CDC, pada tanggal 30 September tahun 2014, terdapat 6.574 total kasus positif virus Ebola yang tersebar di lima negara Afrika (Guinea, Liberia, Nigeria, Senegal, dan Sierra Leone) dan 3.091 kasus korban meninggal akibat terinfeksi virus Ebola (Jacob et al., 2020). Satu tahun setelah wabah virus Ebola terjadi, yaitu pada bulan Maret tahun 2015, MSF mempublikasikan sebuah laporan yang berisi tentang lambatnya penanganan wabah virus Ebola oleh dunia internasional (Ippolito et al., 2015)

Sementara itu virus COVID-19 atau biasa dikenal dengan nama virus Corona merupakan jenis virus terbaru dari keluarga *coronavirus* yang dapat menginfeksi manusia. Sebelum terjadinya wabah virus Corona pada tahun 2020, dunia sebenarnya telah pernah mengalami wabah SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) yang juga berasal dari keluarga *coronavirus* pada tahun 2002. Terjadinya wabah virus Corona bermula pada akhir tahun 2019, tepatnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Dilaporkan oleh otoritas setempat bahwa ada beberapa orang yang mengalami pneumonia dengan gejala yang tidak diketahui.

Pada tanggal 7 Januari tahun 2020, penyebaran virus Corona telah mencapai banyak negara di dunia seperti Thailand, Jepang, Amerika Serikat, Vietnam, dan Singapura. Kemudian

pada tanggal 20 Januari tahun 2020, terdapat laporan bahwa terjadi peningkatan transmisi virus Corona di sejumlah provinsi di Tiongkok. Selanjutnya, pada tanggal 23 Januari 2020, WHO mendeklarasikan PHEIC sebagai respon terhadap situasi penyebaran virus yang semakin mengkhawatirkan. Pada saat dideklarasikannya PHEIC, virus Corona telah menginfeksi sebanyak 7.818 orang di seluruh dunia. Pada tanggal 25 Februari tahun 2020, virus Corona akhirnya mencapai benua Afrika dan Eropa. Karena telah mencapai berbagai negara di dunia, pada tanggal 9 Maret tahun 2020, WHO menyatakan bahwa status penyebaran virus Corona telah menjadi wabah yang membahayakan kesehatan global (WHO, 2020).

Setelah virus Corona dinyatakan sebagai wabah oleh WHO, seharusnya negara-negara di dunia saling bekerja sama agar penyebaran virus Corona dapat ditanggulangi dan wabah virus Corona bisa terselesaikan dengan cepat. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kerja sama internasional dalam menghadapi wabah virus Corona justru tidak optimal. Hal ini diakibatkan negara-negara di dunia lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan membantu negara lain. Sikap Amerika Serikat pada fase awal wabah virus Corona yang menuduh Tiongkok sebagai negara penghasil virus Corona dan menyebarkan kebencian rasial di negaranya adalah salah satu contoh sikap negara yang egois dan non-kooperatif pada masa wabah virus Corona (BBC, 2020).

Selaras dengan Amerika Serikat, sikap Tiongkok pada fase awal wabah virus Corona yang menyensor berbagai informasi mengenai virus Corona dan membuat propaganda seakan berhasil menekan laju penyebaran virus Corona di negaranya juga merupakan salah satu sikap negara yang egois pada masa wabah virus Corona (BBC, 2020). Sikap Tiongkok yang menyensor berbagai informasi mengenai virus Corona yang sedang menyebar di negaranya dibuktikan oleh beberapa wawancara narasumber bernama Chen Mei di negara Tirai Bambu ini (CNN, 2020). Dari wawancara CNN kepada Chen Mei ditemukan fakta bahwa sebenarnya virus Corona telah muncul di Tiongkok sejak pertengahan bulan Desember tahun 2019.

Namun, informasi mengenai penyebaran virus Corona di Tiongkok ini kemudian disensor oleh otoritas Tiongkok dan dianggap sebagai informasi yang tidak benar (CNN, 2020).

Setelah wabah virus Corona berjalan selama setahun, sejumlah vaksin pun mulai muncul dan diedarkan ke berbagai negara di dunia. Namun ternyata, kerja sama internasional untuk mendistribusikan vaksin yang ada terkesan tidak optimal. Hal ini dapat dilihat misalnya pada Amerika Serikat yang menolak untuk bergabung dengan COVAX untuk mendistribusikan vaksin yang tersedia di negara mereka (The Washington Post, 2020). Selain Amerika Serikat, Uni Eropa juga melakukan embargo vaksin AstraZeneca ke berbagai negara internasional. WHO memperingatkan Uni Eropa atas keputusannya ini karena bisa membahayakan kesehatan masyarakat internasional (BBC, 2021).

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kerja sama internasional dalam menghadapi wabah virus Ebola dan Corona bisa dibilang tidak optimal. Oleh karena itu, penulis akan mencoba meneliti mengapa dunia internasional sulit untuk bekerja sama sehingga kerja sama internasional dalam menghadapi wabah virus Ebola dan Corona menjadi tidak optimal.

Sebelum penelitian ini dilakukan, penulis mencari tahu tentang penelitian-penelitian terdahulu mengenai kerja sama internasional terhadap wabah penyakit menular. Benton dan Dionne (2015) menyatakan bahwa terjadinya wabah virus Ebola pada tahun 2014 disebabkan oleh negara-negara di Afrika yang tidak mendukung penanganan wabah virus yang terjadi. Kemudian Brown, Cuetto, dan Fee (2006) menunjukkan bahwa terjadinya wabah virus Ebola diakibatkan oleh kurangnya koordinasi dan kerja sama oleh berbagai institusi internasional seperti WHO, MSF, CDC, dan UNICEF. Penelitian milik Hossain (2016) menyebutkan bahwa wabah virus Ebola terjadi karena WHO terlambat merespon laporan milik MSF di tahun 2014. Selanjutnya penelitian Alvarez (2020) menyebutkan bahwa paska merebaknya virus Corona ke berbagai negara di seluruh dunia, terjadi kegagalan kerja sama antara Amerika Serikat,

Tiongkok, dan WHO. Keengganan Amerika Serikat dalam bekerja sama untuk menangani wabah virus Corona juga dibuktikan oleh penelitian milik Biscop (2020) yang menyatakan bahwa Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat tidak menanggapi secara serius peristiwa wabah virus Corona.

Dari berbagai penelitian di atas, bisa dikatakan bahwa terjadi wabah virus Ebola dan Corona terjadi karena tidak optimalnya kerja sama antar insititusi internasional dengan negara-negara besar untuk menangani wabah yang terjadi. Namun, berbagai penelitian di atas belum menyebutkan apa yang menyebabkan kerja sama internasional dalam menghadapi wabah virus Ebola dan Corona menjadi tidak optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian “Mengapa kerja sama internasional dalam menghadapi wabah virus Ebola dan Corona tidak optimal?”

1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor apa yang menyebabkan tidak optimalnya kerja sama internasional dalam menghadapi situasi wabah penyakit Ebola dan Corona. Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya pemahaman mengenai pentingnya kerjasama internasional di situasi wabah penyakit menular seperti Ebola dan Corona.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu para pembaca untuk memahami tingkah laku aktor negara ataupun institusi terkait ketika dihadapi isu yang *urgent* melalui sudut pandang realis dan liberalis. Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat untuk memperkaya pemahaman realis dalam melihat isu kerja sama internasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi serta referensi bagi para pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan ketika dihadapi oleh situasi lemahnya kerja sama internasional dalam menghadapi wabah penyakit menular seperti Ebola dan Corona ini.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan perspektif realisme dalam menganalisa faktor yang mengakibatkan lemahnya koordinasi internasional dalam menghadapi wabah penyakit Ebola dan Corona. Realisme adalah paradigma yang *state-centric*, yaitu anggapan bahwa negara merupakan *unitary actor* dan aktor paling dominan dalam politik internasional (Rosyidin, 2020). Realisme memiliki *core argument* yang menekankan kondisi dunia internasional yang anarki dan sifat dasar manusia yang tidak baik mengakibatkan hubungan antar negara hanya sebagai wadah untuk memenuhi kepentingan masing-masing negara (Donnelly, 2000). Karena adanya keadaan anarki ini juga negara-negara selalu diliputi rasa curiga, cemas, dan takut akan maksud negara lain. Akibatnya hubungan antar negara lebih bersifat konfliktual alih-alih kooperatif (Rosyidin, 2020).

Dalam buku *Introduction to International Relations* karya Robert Jackson dan George Sorensen disebutkan juga bahwa asumsi dasar dari paradigma realisme adalah pertama pandangan yang pesimistis terhadap sifat dasar manusia; kedua hubungan internasional bersifat konfliktual dan hanya bisa diselesaikan oleh konflik antar bangsa; ketiga keamanan dan kedaulatan negara sangat berharga dalam dunia internasional dan; keempat bersikap skeptis terhadap keberlangsungan politik internasional (Jackson & Sorensen, 2013). Sebagaimana telah disebutkan oleh Donnelly, Jackson & Sorensen juga berargumen bahwa paradigma realis mempunyai *core assumption* berupa ketiadaan kepemimpinan yang lebih tinggi dalam dunia internasional (anarki) (Jackson & Sorensen, 2013).

Meskipun tidak ada kepemimpinan yang lebih tinggi dalam dunia internasional, hierarki antar negara masih tetap ada disini. Paradigma realis beranggapan bahwa hubungan internasional merupakan persaingan kekuatan untuk mendapatkan dominasi dan keamanan yang paling unggul untuk masing-masing negara. tentunya negara yang lemah akan sulit bersaing dengan negara yang kuat (Jackson & Sorensen, 2013). Kondisi yang tidak seimbang inilah yang mengakibatkan dunia internasional akan selalu dipenuhi oleh konflik (Burchill et al., 2005).

Ketiadaan otoritas yang lebih tinggi daripada yang lain juga dibahas oleh Ian Bremmer dalam bukunya yang berjudul *Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World*. *G-Zero* mempunyai definisi sebagai sebuah tatanan dunia dimana tidak ada satupun negara ataupun aliansi antar negara yang mampu mengisi kepemimpinan global. Pada zaman dahulu di tahun 1940-an posisi kepemimpinan global diisi oleh negara Amerika Serikat karena tatanan dunia yang unipolar. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam tujuh dekade terakhir ini, kita hidup dalam tatanan dunia tanpa ada kepemimpinan global (Bremmer, 2012).

Ketiadaan kepemimpinan global dalam dunia internasional saat ini kemudian menyebabkan terjadinya kekacauan dalam skala global. Hal ini dijelaskan oleh konsep *entropy* milik Randall Schweller dalam bukunya yang berjudul *Maxwells Demon and the Golden Apple: Global Discord in the New Millenium*. Pada buku ini Schweller menjelaskan pola politik internasional menggunakan analogi entropi. Entropi merupakan salah satu isi dari Hukum Kedua Termodinamika yang memiliki keterkaitan dengan ketidakteraturan, ketidakpastian, dan kekacauan (Schweller, 2014). Pengaplikasian entropi pada kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada pembentukan es batu yang berasal dari molekul air. Perubahan air menjadi es batu disebabkan oleh jumlah entropi yang sangat rendah pada molekul air sehingga objek tersebut menjadi lebih padat dan teratur. Intinya, semakin tinggi entropi pada suatu objek maka semakin

tinggi juga ketidakteraturan yang ada pada benda tersebut (Schweller, 2014). Entropi juga memiliki sifat bahwa suatu objek akan lebih mudah untuk dihancurkan daripada diperbaiki.

Dalam politik internasional, entropi diibaratkan sebagai struktur internasional yang berfungsi sebagai penahan (*constraint*) untuk membatasi dan menjaga perilaku negara-negara dalam batas yang wajar. Jika struktur internasional sudah tidak bisa membatasi perilaku negara, semakin tinggi juga kemungkinan negara-negara untuk bertindak semaunya tanpa batasan yang wajar dan akan menyebabkan ketidakteraturan (Schweller, 2014). Lemahnya struktur internasional untuk membatasi perilaku negara dapat dilihat paska perang dingin, ketika AS menjadi unipolar di tahun 1991. Status AS sebagai unipolar saat itu menyebabkan AS memiliki kebebasan untuk berpihak pada siapa saja yang menurut AS menguntungkan. Meskipun demikian, negara-negara lain juga memiliki kebebasan untuk tidak bekerja sama ataupun beraliansi dengan AS. Tanpa adanya kekuatan lain selain AS, negara-negara tidak perlu khawatir dengan ancaman negara besar lainnya, karena AS merupakan *command of the commons* atau negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia dan dapat memastikan keamanan dunia sebagai unipolar (Schweller, 2014).

Di satu sisi, kondisi dunia yang memasuki fase multipolar saat ini juga menawarkan masalah baru pada struktur internasional yang ada. Dengan ketiadaan satu negara yang bertindak sebagai unipolar, maka negara-negara yang memiliki pengaruh yang sama besarnya akan saling bersaing satu dengan yang lainnya dan cenderung memilih opsi perang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada penyelesaian masalah yang tidak damai (seperti perang) untuk menyelesaikan permasalahan (Schweller, 2014). Dengan sikap negara yang demikian maka kondisi dunia internasional akan lebih konfliktual karena terjadi penambahan “entropi” dalam struktur internasional yang ada. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Schweller menawarkan solusi yang bernama *Hegemonic Wars*. *Hegemonic Wars* merupakan situasi dimana negara-negara yang berpengaruh di dunia saling berperang satu dengan yang

lain dan akhirnya menyebabkan pembaharuan struktur internasional (Schweller, 2014). Hal ini selaras dengan sifat entropi yang menyatakan bahwa suatu objek (sistem internasional) lebih mudah dihancurkan daripada diperbaiki (Schweller, 2014).

Meskipun menurut Schweller terdapat kelemahan struktur internasional dalam unipolarisme, *Hegemonic Stability Theory* (HST) menyatakan bahwa hegemon global tetap dibutuhkan agar kestabilan dunia internasional dapat terjaga dengan baik. HST pertama kali dicetuskan oleh Charles P. Kindleberger, Robert Gilpin, dan Stephen Krasner pada pertengahan tahun 1970an. Teori ini memiliki argumen bahwa tanpa peran suatu aktor yang hegemon maka kondisi internasional yang stabil tidak mungkin bisa tercipta (Yazid, 2015). Kindleberger, Gilpin, dan Krasner mengambil contoh pada negara Inggris di abad ke-19 dan AS pasca perang dunia kedua yang mampu menciptakan stabilitas politik dan ekonomi internasional karena statusnya yang merupakan kekuatan hegemon di masa tersebut (Webb & Krasner, 1989).

Kindleberger secara spesifik menyatakan dalam tulisannya yang berjudul *Dominance and Leadership in the International Economy: Exploitation, Public Goods, and Free Rides* bahwa agar perekonomian dunia menjadi stabil, diperlukan sebuah *stabilizer* yang mampu mengatur perputaran ekonomi internasional dan distribusi barang ke seluruh dunia (Kindleberger, 1981). Negara yang pernah menjadi *stabilizer* dalam perekonomian internasional adalah Inggris saat melakukan kolonialisasi pada abad ke-19 dan AS pasca perang dunia kedua hingga tahun 1971 (Kindleberger, 1981). Namun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah, belum ada negara yang mampu dan mau menggantikan hegemoni global seperti yang dilakukan oleh Inggris dan AS pada masa lampau. Ketiadaan hegemon global akhirnya berimplikasi pada kesenjangan perekonomian internasional karena pendistribusian barang yang tidak merata antar negara (Kindleberger, 1981).

Pernyataan milik Kindleberger juga sejalan dengan pernyataan milik Robert Gilpin dalam bukunya yang berjudul *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order*. Gilpin menyatakan bahwa dibutuhkan sebuah hegemon tunggal sebagai pemimpin untuk menggerakkan roda perekonomian internasional (Gilpin, 2001). Dalam buku ini, Gilpin juga mengutip argumen para ekonom yang pro terhadap HST dalam dunia internasional; beberapanya ialah Barry Eichengreen, Nobel Laureate Robert Mundell, Bruno Frey, dan Mancur Olson (Gilpin, 2001). Eichengreen berpendapat bahwa situasi multilateralisme yang optimal sepanjang sejarah, terjadi saat adanya kekuatan dominan dalam dunia internasional. Lebih lanjut, Eichengreen menjelaskan bahwa ketiadaan hegemon akan mengakibatkan sulitnya kerja sama internasional dalam bidang perekonomian internasional (Gilpin, 2001). Mundell sebagai ahli dalam urusan keuangan internasional juga menekankan bahwa kestabilan sistem keuangan internasional bergantung dengan kehadiran sebuah hegemon global (Gilpin, 2001).

Dengan demikian posisi AS ataupun negara manapun yang mampu mengisi posisi kepemimpinan global sangat dibutuhkan agar kestabilan politik dan ekonomi internasional dapat terjaga dengan baik. Tetapi yang terjadi saat ini adalah AS tidak mampu mengisi posisi kepemimpinan global karena pengaruhnya yang sudah luntur dalam dunia internasional. Charles A. Kupchan dalam tulisannya yang berjudul *No One's World* menyatakan bahwa saat ini AS tidak menyandang status sebagai *hegemonic power* lagi. Hal ini dikarenakan negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Brazil telah mampu menaikkan pengaruhnya di dunia internasional (Kupchan, 2012). Turunnya AS dari posisi kepemimpinan global pun dinyatakan pula oleh Amitav Acharya dalam bukunya yang berjudul *The End of American World Order*. Disini Acharya menulis bahwa saat ini berada di dalam fase *Multiplex* atau multipolar. Saat ini negara-negara seperti BRICS (Brazil, Russia, India, Tiongkok, dan South Africa) dapat

mengimbangi kekuatan AS dalam dunia internasional dan menyebabkan AS turun dari posisinya sebagai hegemoni global (Acharya, 2014).

Kondisi dunia internasional yang berada dalam fase *G-Zero*, absennya kepemimpinan global, serta sikap negara menurut teori realisme ketika wabah virus Ebola dan Corona terjadi mengakibatkan kerja sama internasional untuk menangani wabah penyebaran virus tersebut menjadi tidak optimal. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan paradigma realisme, konsep *G-Zero*, konsep entropi, serta *Hegemonic Stability Theory* untuk menganalisis tidak optimalnya kerja sama internasional ketika menghadapi wabah virus Ebola dan Corona .

1.6 Operasionalisasi Konsep

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan konsep Kerja Sama Internasional, Kepemimpinan Global serta Anarki.

1.6.1 Kerja sama Internasional

Kerja sama Internasional adalah kerja sama oleh negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama (Keohane, 1984). Menurut Keohane, situasi kerja sama bisa tercapai apabila berbagai aktor baik individual, organisasi, maupun negara dapat saling mendukung sehingga tercipta suatu kondisi yang harmoni antara satu dengan yang lainnya (Keohane, 1984). Kerja sama internasional dapat diimplementasikan ke berbagai sektor yang ada dalam dunia internasional seperti ekonomi, keamanan, politik, dan juga kesehatan global.

Isu kesehatan menjadi salah satu topik penting dalam kerja sama internasional. Hal ini dikarenakan menurut Paulo M. Buss, petinggi dari *World Federation of Public Health Associations*, kesehatan global merupakan salah satu dari permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh dunia pada abad ke 21 ini (Buss, 2010). Buss juga menyatakan bahwa isu kesehatan global telah menjadi salah satu fokus utama dalam kerja sama internasional.

1.6.2. Kepemimpinan Global

Kepemimpinan Global adalah adanya suatu negara atau aliansi internasional yang mampu memimpin tatanan dunia global (Bremmer, 2012). Ian Bremmer dalam bukunya yang berjudul *Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World* menjelaskan bahwa dunia saat ini telah memasuki fase G-Zero. Menurut Bremmer, G-Zero adalah fase dimana tidak terdapatnya kepemimpinan global dalam dunia internasional (Bremmer, 2012). Situasi ini terjadi karena tidak ada satu negara manapun yang memiliki pengaruh dominan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari negara-negara lainnya (Bremmer, 2012).

1.6.3. Anarki

Anarki merupakan konsep yang ada dalam teori realisme, dilansir dari buku milik Joseph Nye dan David Welch yang berjudul *Understanding Global Conflict and Cooperation*, Anarki adalah kondisi ketiadaan otoritas yang lebih tinggi dari yang lain (Nye & Welch, 2017). Dengan adanya kultur anarki dalam hubungan internasional, tidak ada aktor internasional baik negara maupun organisasi yang mampu menegakkan hukum atau peraturan dalam ranah internasional (Eckstein, 2020).

1.7 Argumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berargumen bahwa kondisi dunia tanpa kepemimpinan global serta situasi dunia internasional yang anarki mengakibatkan kerja sama internasional dalam menghadapi wabah virus Ebola dan Corona menjadi tidak optimal.

1.8 Metode penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Dalam menjalankan penelitian ini penulis akan menggunakan tipe penelitian eksplanatif yang mencoba menjelaskan mengenai tidak optimalnya kerja sama internasional dalam menghadapi wabah virus Ebola dan Corona.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di tempat tinggal penulis di wilayah Universitas Diponegoro, Semarang. Selain itu penelitian ini juga akan dilakukan di tempat asal penulis di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Penelitian ini akan menggunakan metode *desk research* yang memungkinkan penulis untuk mencari data-data yang relevan dengan penelitian yang sedang dijalankan.

1.8.3. Subjek Penelitian

Penulis akan mengambil subjek negara-negara maju dan berkembang seperti AS, Tiongkok, Inggris, Jerman serta aliansi internasional seperti WHO, MSF dan COVAX untuk dijadikan subjek penelitian.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang dimana penulis akan mengambil data dari berbagai literatur yang tersedia untuk menjawab permasalahan penelitian.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah buku-buku yang membahas mengenai kerjasama internasional, jurnal dengan topik Ebola dan Corona , artikel serta media massa yang terkait dengan permasalahan penelitian seperti misalnya: JSTOR, ScienceDirect, The Diplomat, The New York Times, BBC, CNN.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan mengumpulkan data dengan teknik studi literatur untuk menjawab permasalahan penelitian. Mengutip pada buku “Metode Penulisan Karya Ilmiah” milik Endang Danial dan Nanan Wasriah, teknik studi literatur pada penelitian sebuah teknik yang berfokus pada pengumpulan sejumlah buku-buku, majalah, dan artikel yang memiliki kaitan dengan masalah dan tujuan penelitian (Danial & Wasriah, 2009). Tujuan teknik studi literatur

digunakan pada penelitian adalah untuk menelaah berbagai teori-teori yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian (Danial & Wasriah, 2009).

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini akan menggunakan analisis data kongruen untuk mencocokkan, menganalisis serta mencari hubungan adanya hubungan sebab akibat antara data yang tersedia dengan teori yang penulis gunakan untuk penelitian ini. Metode Kongruen adalah sebuah metode penelitian yang diawali dengan teori lalu kemudian mencari data yang cocok untuk menjelaskan kasus yang sedang diteliti. Metode Kongruen juga menyatakan hubungan antar variabel bebas dan variabel dependen pada kasus yang sedang diteliti. Jika nanti hasil dari penelitian tersebut berbanding lurus dan konsisten dengan teori yang digunakan maka kemungkinan besar terjadi hubungan sebab akibat pada kasus yang diteliti (George & Bennet, 2005).